



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Kode Pos 75514
Tenggarong Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website :
inspektorat.kukarkab.go.id

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana perihal tersebut di atas. Evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil sebagai berikut :

Dasar Evaluasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Surat Kementerian PAN dan RB No. B/23/M.PANRB/08/2016 tanggal 22 Juni 2016, Prihal : Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016.

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor. B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Prihal : Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itkab-094/363/ST-SAKIP/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020

Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahannya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP tersebut.

Tujuan Evaluasi

Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.

Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan selama 15 (Lima Belas) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan selesai 24 Juli 2020.

Ruang Lingkup dan Metodologi Evaluasi.

Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Selain itu pula, dilaksanakan terhadap :

Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.

Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan

Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Metodologi evaluasi dengan teknik ”*criteria referenced survey*”, menilai secara bertahap setiap komponen dengan kriteria evaluasi yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi.

Batasan Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan terhadap Sistem Akuntabilitas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penilaian Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dan predikat D, C, CC, B, BB, A, AA dengan rincian sebagai berikut :

Nilai 0 s.d. 30, predikat penilaian “D” (Sangat Kurang)

Nilai > 30 s.d. 50, predikat penilaian “C” (Kurang)

Nilai > 50 s.d. 60, predikat penilaian “CC” (Cukup/Memadai)

Nilai > 60s.d. 70, predikat penilaian “B” (Baik)

Nilai > 70s.d. 80, predikat penilaian “BB” (Sangat Baik)

Nilai > 80 s.d. 90, predikat penilaian “A” (Memuaskan)

Nilai > 90s.d. 100, predikat penilaian “AA” (Sangat Memuaskan)

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016 tidak ditindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan kepada OPD

Menurut penjelasan dari Kasubag Perencanaan/Keuangan tahun 2017 dan 2018 bukan bagian dari Perangkat Daerah yang menjadi sampling evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019 memperoleh nilai sebesar **61,56 (Enam Puluh Satu Koma Lima Enam)** atau dengan predikat penilaian “ **B** ” (**Baik**). Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut sebagaimana berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	HASI PENILAIAN EVALUASI AKIP				
		Bobot (%)	Nilai Tahun 2016	Nilai Tahun 2017/2018	Nilai Tahun 2019	Peningkatan/penurunan capaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	23,97	Tidak dievaluasi oleh Inspektorat Kab. Kukar	20,74	(3,23)
2	Pengukuran Kinerja	25	18,83		13,44	(5,39)
3	Pelaporan Kinerja	15	11,03		10,07	(0,96)
4	Evaluasi Internal	10	9,63		3,25	(6,38)
5	Pencapaian Kinerja	20	13,75		14,06	0,31
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,21		61,56	(15,65)
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		B	

Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa secara umum **terjadi penurunan kinerja** dalam penerapan system akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan tahun yang lalu. Uraian hasil evaluasi tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut

Rencana kinerja belum dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran

Rencana Aksi telah dilaksanakan dan dimonitor pencapaiannya secara berkala namun capaian kinerja tidak tergambar dengan jelas progres setiap kegiatan pada monitor kegiatan

Rencana Aksi telah dilaksanakan namun hasilnya tidak dapat dimanfaatkan oleh pimpinan di dalam memberikan arahan pengorganisasi kegiatan

Indikator kinerja individu (IKI) eselon II, III, IV sampai level staf yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasan belum dibuat Perangkat Daerah

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)

Pengukuran kinerja telah dilakukan namun belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi
Hasil Pengukuran capaian kinerja eselon III dan IV dalam organisasi belum dikaitkan dengan pemberian reward dan punishment
Laporan kinerja tentang efisiensi penggunaan sumber daya substansinya belum disajikan di dalam LKJiP
Evaluasi terhadap Rencana Aksi (dipersamakan dengan E-monev oleh Bappeda melalui kegiatan Rakodal) telah dilakukan, namun Rencana Aksi secara internal belum dilakukan Perangkat Daerah
Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja
Pemantauan Rencana Aksi belum dilakukan dalam rangka memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode
Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka mengefektifkan penerapan SAKIP OPD kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

Rencana Kinerja agar menjadi perhatian di dalam menyusun anggaran:

Indikator

Lokasi

Target dan Pagu anggaran

Rencana Aksi dalam pelaksanaannya agar dimonitor pencapaiannya :

Jadwal pelaksanaan kegiatan

Target kegiatan

Ketersediaan anggaran

Progres capaian kegiatan

Hambatan/permasalahan yang terjadi

Solusi atas permasalahan tersebut

Penanggungjawab kegiatan

Hasil monitoring, evaluasi kegiatan dan penyajian informasi kinerja lebih efektif mungkin atas pelaksanaan Rencana Aksi agar dapat digunakan pimpinan di dalam memberikan arahan pengorganisasian kegiatan

Agar membuat Indikator kinerja individu (iki) eselon II, III, IV sampai level staf yang mengacu kepada unit kerja organisasi

Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dihimpun bagian Perencanaan setiap bulan/triwulan/semester dengan jalan membuat SOP atau surat edaran Kepala Dinas tentang batas waktu penyampaian pengumpulan data kinerja (progres setiap kegiatan)

Pengukuran kinerja agar menggunakan Teknologi Informatika berupa aplikasi pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV sampai level staf agar dikaitkan dengan pemberian :

- Reward (berupa penghargaan setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) Tahun bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik melalui tim penilai yang dibentuk OPD
- Punishment (diberikan kepada pegawai yang tidak disiplin, kinerja kurang baik)

Agar menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya yang dituangkan dalam narasi yaitu perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi fisik keuangan maka tergambar efisiensi

Evaluasi atas Rencana Aksi secara internal Perangkat Daerah agar dilakukan :

- Evaluasi terhadap sasaran
- Evaluasi Indikator Kinerja
- Jadwal kegiatan
- Program/kegiatan
- Target kegiatan
- Anggaran
- Progres setiap kegiatan
- Hambatan/permasalahan
- Solusi atas permasalahan
- Berita acara evaluasi, daftar hadir, notulen rapat

Pemantauan Rencana Aksi agar dilakukan dengan jalan membuat matrik kerja untuk pengendalian kinerja yang berisikan :

- Pelaksanaan kegiatan
- Evaluasi pelaksanaan
- Monitoring atas pelaksanaan

Pemantauan Rencana Aksi agar dilakukan dalam rangka memberikan alternatif perbaikan dengan jalan :

- Melakukan evaluasi terhadap capaian progres kegiatan
- Mencari penyebab/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
- Memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi sebagai alternatif perbaikan

Hasil evaluasi terhadap Rencana Aksi agar dijadikan acuan dalam melakukan perbaikan setiap periode :

- Informasi kinerja yang disajikan harus terukur dengan jelas
- Data yang disajikan harus valid dan mudah dimengerti
- Pelaksanaan monitoring terjadwal dengan baik
- Tahap-tahapan dalam pengendalian terdokumentasi dengan baik

Hasil Evaluasi Rencana Aksi akan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata :

- Melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen penilaian Sakip mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Membuat matrik evaluasi yang berisikan komponen penilaian Sakip dengan rekomendasi dan langkah-langkah nyata dalam rangka perbaikan atas hasil evaluasi

Menyajikan tabel perbandingan data tahun lalu dengan tahun berjalan yang ada relevansinya dengan rekomendasi atas evaluasi Menyajikan bukti yang mendukung untuk menjawab rekomendasi tersebut